

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA KABUPATEN GROBOGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan

Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2008. Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan di bidang kebinamargaan serta pengawasan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

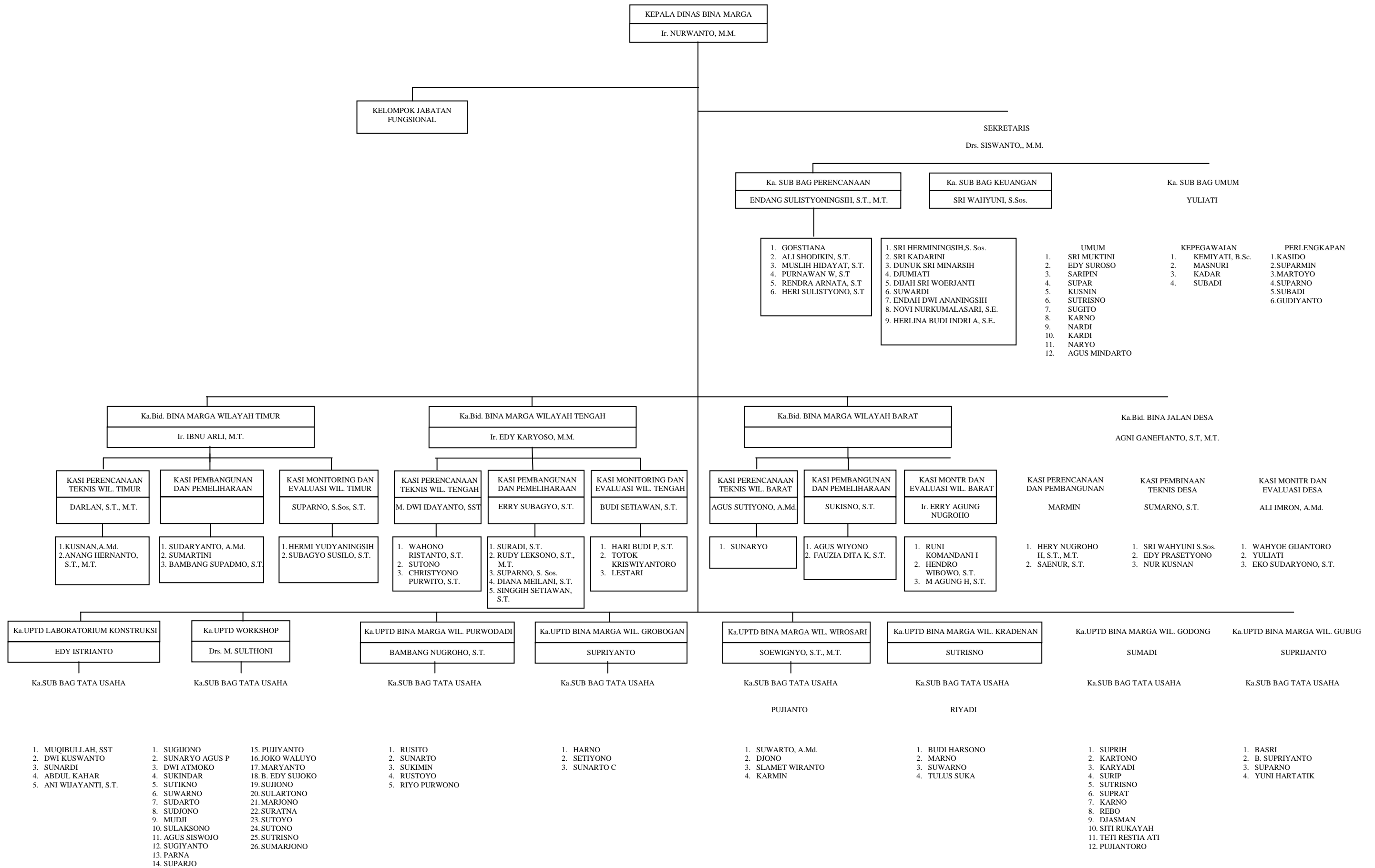
1. Penyusunan rencana kerja di bidang bina marga,
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga,
3. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga,
4. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga,
5. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga,
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan dinas,
7. Pemberian rekomendasi perijinan di bidang bina marga,
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional dan,
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan diuraikan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Adapun Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum

- c. Bidang Bina Marga Wilayah Timur, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Timur
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Wilayah Timur
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Timur
- d. Bidang Bina Marga Wilayah Tengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Tengah
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Wilayah Tengah
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Tengah
- e. Bidang Bina Marga Wilayah Barat, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Barat
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Barat
- f. Bidang Bina Jalan Desa
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan
 - 2. Seksi Pembinaan Teknis Desa
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Desa
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Purwodadi
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Grobogan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Wirosari
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Kradenan
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Godong
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Gubug
- m. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Konstruksi
- n. Unit Pelaksana Teknis Workshop.

**SUSUNAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TATA KERJA KARYAWAN/KARYAWATI
PADA DINAS BINA MARGA KABUPATEN GROBOGAN**



2.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan

Aparatur di lingkungan Dinas Bina Marga per - Juli 2011, terdiri dari :

PENDIDIKAN	JUMLAH
Pendidikan Dasar	10
Pendidikan SLTP (ST)	20
Pendidikan SLTA (STM)	56
Sarjana Muda / DIII	4
Sarjana / S1	16
Program S2	13
Program S3	-
JUMLAH TOTAL	119

Adapun berdasarkan Golongan aparatur di lingkungan Dinas Bina Marga Kab. Grobogan adalah sebagai berikut :

GOLONGAN	JUMLAH
I	13
II	41
III	61
IV	4
JUMLAH TOTAL	119

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga Kab. Grobogan terdiri dari :

1. Tanah : 16.820 m²
(Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No. 48 seluas 1.540 m² dan Jl. Gajahmada Purwodadi seluas 15.280 m²)
2. Gedung : 8 unit
3. Kendaraan Dinas
 - a) Mobil dinas : 3 unit
 - b) Sepeda Motor Dinas : 6 unit
4. Prasarana kantor, seperti komputer, televisi dan lain-lain
 - a) Komputer : 23 unit
 - b) Televisi : 1 unit

Namun untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, tenang dan nyaman diperlukan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi darat merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

Semakin meningkatnya mobilitas fisik dan sosial masyarakat, peranan jalan juga semakin meningkat sehingga dewasa ini bukan hanya untuk mempermudah arus transportasi, melainkan pula berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Pengembangan jaringan jalan dilakukan dengan pendekatan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan.

Dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan pada bab III pasal 5 dinyatakan bahwa;

1. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum diperuntukkan untuk lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan, dan dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Sistem jaringan jalan dapat dibagi menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Jalan umum dikelompokkan menurut fungsinya menjadi jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan. Jalan arteri berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri-ciri pelayanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Jalan umum dikelompokkan menurut statusnya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan-jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk ke dalam jalan nasional maupun jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan strategis kabupaten. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil, antar persil, serta antar pusat permukiman dalam kota.

Sistem jaringan jalan yang ada pada Kabupaten Grobogan, berdasarkan status jalan adalah :

1. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang = 211,74 Km
(Berdasarkan SK. Gubernur Jawa Tengah No : 620 / 12 / 2010 ,
Tgl : 02 Agustus 2010)
2. Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang = 883,1 Km
(Berdasarkan SK. Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 1997)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut, maka laporan dari *World Economic Forum* 2008 - 2009 hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 134 negara yang diteliti, dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (16,4%) merupakan penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien (19,3%). Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat membaik. Dari data kondisi umum daerah Kabupaten Grobogan, maka dapat disimpulkan adanya faktor tantangan dan peluang sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan pembangunan jalan

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
4. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi.
5. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan, yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada lintas kecamatan dan wilayah perkotaan.

6. Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

2.4.2 Peluang

Untuk menghadapi tantangan tersebut, peluang-peluang yang dimiliki adalah:

1. Adanya program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan secara terus menerus tiap tahun.
2. Adanya dana pinjaman dari Bank Jateng, dana bantuan dari pemerintah pusat yang berupa DAK, dan dana bantuan dari pemerintah propinsi yang berupa Bantuan Sarpras untuk program pembangunan jalan dan jembatan
3. Sudah terbentuknya UPTD yang melaksanakan pemeliharaan rutin di wilayah kerja masing-masing.
4. Adanya perekrutan tenaga teknis melalui seleksi CPNS.